

Analisis Sistem Perkreditan dan Pembiayaan Pola Pengambe' pada Wirausaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Muncar Jawa Timur

Adyla Mita Lestari^{1*}, Juli Rahaju²

^{1,2} Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

* e-mail: dyla.mita@gmail.com

Abstract: The existence and Role of Pengambe' (Money Lender) often invokes a negative assumption, the land such that the Pengambe' functions as a profiteer who exploits the small scale of Fisherman. Because of this assumption, it is widely accepted the existence of pengambe', although the government has provided the fisherman with several opportunities to access various other credit facilities, the Result have been unsatisfactory and the Fisherman's dependence on the pengambe' or other non formal means of credit has continued. This research aims to describe the loan giving system of the pengambe' to the Fisherman, describing sociological factors which play a role in the existence of pengambe'; as a source of non formal credit. The result of this analysis will hopefully clarify why this pengambe' exists within the smallscale fishing community and hopefully can be used by the government to formulate a credit policy for this fisherman. Apart from that, it is also hoped to change the negative stereotype view of the public towards the role of this pengambe';.

Keywords: understanding concepts, conceptual understanding procedures, mind mapping.

Abstrak: Keberadaan dan Peran Pengambe' (Pemberi Pinjaman Uang) sering invokes a negative assumption, lintah darat sedemikian rupa sehingga Pengambe' berfungsi sebagai pencatut yang mengeksploitasi Nelayan skala kecil. Dengan asumsi ini, maka diterima dengan baik existence of pengambe', although pemerintah telah memberikan beberapa kesempatan kepada nelayan untuk mengakses berbagai fasilitas kredit lainnya, Hasilnya tidak memuaskan dan dependensi Nelayan pada pengambe' atau sarana kredit non formal lainnya terus berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemberian pinjaman pengambe' kepada Nelayan, menggugurkan faktor sosiologis dengan memainkan aturan dalam keberadaan pengambe'; sebagai sumber kredit non formal. Hasil analisis ini akan memperjelas mengapa pengambe' ini adalah masyarakat nelayan skala kecil dan hopefully dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan kredit bagi nelayan ini. Selain itu, juga diharapkan dapat mengubah pandangan stereotype negatif masyarakat terhadap aturan pengambe' ini;.

Kata kunci: pemahaman konsep, conceptual understanding procedures, mind mapping.

Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Besarnya potensi kelautan Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km (Sukanto, 2017a). Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² Perairan Nusantara dan 2,7 juta km² Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari besarnya potensi sumberdaya kelautan Indonesia seperti tersebut diatas, potensi sumberdaya ikan laut di seluruh perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun (Erniati et al., 2022; Sukanto, 2017c).

Pandemi COVID-19 yang terjadi selama tiga tahun terakhir sejak 2019 hingga 2022 menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia (Nasir, 2020; Rantauni & Sukmawati, 2022).

Keterampilan nelayan menyebabkan usaha mereka kurang produktif dan tidak efisien, sehingga untuk menghasilkan sejumlah produksi memerlukan biaya/input produksi yang besar, akibatnya pendapatan riil yang diperolehnya relatif kecil. Bahkan kenaikan harga input-input produksi yang diperlukan seperti BBM, tidak diimbangi dengan kenaikan harga ikan yang memadai sehingga posisi nelayan skala kecil dalam meningkatkan pendapatannya menjadi semakin sulit (Iraa, 2020; Sukanto, 2017b).

Adanya keterikatan nelayan kepada lembaga perkreditan non-formal/pelepas uang/pedagang, ternyata hampir terdapat di semua daerah pesisir pantai di Jawa Timur yang memiliki kegiatan usaha penangkapan ikan termasuk daerah Muncar. Daerah Muncar merupakan daerah pantai yang memiliki potensi penangkapan ikan cukup besar di Jawa Timur, dimana masyarakat nelayannya tentu juga tidak terlepas dari adanya kegiatan sistem perkreditan. Di Muncar istilah lembaga perkreditan non-formal/pelepas uang/pedagang yang memberi pinjaman kepada nelayan disebut "Pengambe" (Muhartono & Nurlaili, 2019).

Keberadaan dan peranan pengambe' di Muncar ini sering menimbulkan asumsi negatif, yang menganggap bahwa pengambe' menjadi "lintah darat" yang seharusnya dihapuskan. Namun pada kenyataannya, meskipun pemerintah telah memberi peluang pilihan sistem kredit yang lebih baik tetapi ketergantungan nelayan kepada pengambe' masih terus berlanjut. Pada dasarnya asumsi tersebut merupakan suatu anggapan atau buah pikiran mengenai suatu hal yang belum pasti kebenarannya (Mubiroh & Ruscitasari, 2020; Sari, 2020). Sebagaimana dikemukakan bahwa kita hendaknya mengkaji kembali asumsi yang selama ini mendasari pembangunan perikanan skala kecil. Salah satu dari asumsi tersebut menganggap bahwa pemberi pinjaman perorangan (lembaga kredit non-formal) ini sangat merugikan nelayan, sehingga hubungan sosial yang selama ini terbentuk harus diganti oleh kelembagaan kredit yang baru (formal) (Febriansyah et al., 2021; Nasir, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam usaha yang dilakukan (Rasbin, 2020). Kredit yang disalurkan oleh bank merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank bersangkutan, pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bank. Apabila pemberian kredit berjalan dengan baik, maka bunga kredit

dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan (Eklesia & Riyadi, 2021). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perkreditan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui penyediaan akses keuangan untuk masyarakat ekonomi lemah dan usaha mikro, kecil dan menengah. Berbeda pada penelitian ini, pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis system perkreditan dan pembiayaan pla pengembe' pada wirausaha penangkapan ikan dengan skala kecil.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif (Anggito, A, & Setiawan, 2018; Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan di daerah Muncar kabupaten Banyuwangi. Lokasi tersebut ditentukan secara sengaja (*purposive*), berdasarkan pertimbangan bahwa daerah Muncar merupakan daerah dengan konsentrasi nelayan yang cukup padat serta peranan pengambe'/pedagang sebagai pemberi pinjaman kepada nelayan cukup dominan. Waktu Penelitian dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari 2006, pada saat musim tangkap sedang berlangsung. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan cara *Snowball Sampling* (Sugiyono, 2018). Cara ini dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Peneliti hanya tahu satu atau dua orang yang berdasar penilaian bisa dijadikan informan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu pengambe'/pedagang dan nelayan yang meminjam modal pada pengambe'/pedagang, dengan cara pengamatan serta wawancara secara mendalam (*in depth interview*) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau catatan yang ada baik dari instansi pemerintahan terkait yaitu Dinas Perikanan, Koperasi (KUD), TPI, Pusat pendaratan Ikan/Pelabuhan perikanan dan lembaga swasta atau Lembaga Swadaya masyarakat yang bergerak dalam pengembangan masyarakat nelayan di wilayah penelitian serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media. Data sekunder dimaksudkan untuk mendukung penulisan pada penelitian ini. Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan hasil penelitian, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yakni dengan mengajukan pertanyaan secara lebih luas/ mendalam dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada informan. Dalam hal ini analisis diarahkan pada kecenderungan-kecenderungan yang mendasari keberadaan dan berfungsinya pola perkreditan pengambe'/pedagang dalam masyarakat. Tinjauan yang

dilakukan tidak terbatas pada hubungan sosial antara pengambe'/pedagang dengan nelayan, tetapi juga melihat aspek peranan pemerintah dalam kebijaksanaannya tentang perkreditan pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Pemberian Pinjaman Pola Pengambe'

Alokasi penggunaan pinjaman antara lain adalah untuk keperluan menambah pembelian alat-alat produksi (perahu, mesin dan alat tangkap) yang baru, atau untuk keperluan perbaikan atau perawatan alat-alat produksi dan biaya operasi. Disamping itu juga, sebagian pinjaman digunakan untuk memberi ikatan atau mengontrak serta pemberian pinjaman lainnya kepada nelayan.

Jika diperhatikan dari jumlah nelayan pemilik yang meminjam dan jumlah nilai pinjamannya, ternyata terdapat kecenderungan bahwa jumlah pinjaman modal antara nelayan pemilik berbeda untuk tiap-tiap alat tangkap. Sebagai contoh nelayan pemilik unit usaha payang mempunyai jumlah pinjaman yang lebih banyak dibanding dengan nelayan pemilik unit usaha jaring dan pancing. Keadaan demikian cukup wajar mengingat jumlah nelayan unit usaha payang antara 13 sampai 15 orang, dan pada umumnya masing-masing nelayan mempunyai ikatan atau pinjaman kepada pengambe'. Sedangkan pada unit usaha jaring jumlah nelayan hanya berkisar 3 sampai 4 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di Muncar ada berbagai macam kredit non formal atau yang lebih dikenal dengan Pengambe'. Ada empat sistem perkreditan non formal (diluar kredit Bank), yaitu :

1. Kredit yang didapatkan khususnya untuk membeli kekurangan perlengkapan alat tangkap. Umumnya besarnya kredit yang terjadi berkisar antara Rp.10 juta sampai dengan Rp.30 juta
2. Kredit yang diupayakan untuk kelangsungan biaya-biaya operasional dalam operasi penangkapan. Umumnya besarnya kredit yang dilakukan adalah bervariasi antara Rp. 1,5 juta sampai dengan Rp. 3 juta.
3. Kredit Bapak angkat antara perusahaan pengolah (pengalengan, penepungan) dengan juragan darat (pemilik), umumnya besarnya mencapai Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 20 juta. Kredit demikian adalah tanpa bunga didasarkan atas kepercayaan terlebih dahulu dan sifatnya mengikat dengan hasil tangkapan harus dijual kepada perusahaan dengan harga pasar (umum).

4. Kredit untuk biaya pengikat bagi anak buah kapal. Umumnya besarnya kredit tidak terlalu besar yaitu sekitar Rp. 1,5 juta sampai dengan Rp. 3 juta.

Masyarakat Muncar adalah penduduk yang nilai keketatan religiusnya (Islam) cukup tinggi, sehingga persepsi pengambe' pada setiap pemberian kredit tidak pernah dikaitkan dengan bunga uang (*intrest*) yang lebih berbau riba (dalam hukum Islam dilarang), sehingga bentuknya lebih dikaitkan kepada persentase hasil produksi ikan yang telah dirupiahkan untuk setiap kali proses prduksi.

Dari keempat sistem perkreditan yang ada, memberikan konsekuensi kecurian yang berbeda. Pada sistem perkreditan non formal realisasi transaksi perkreditan (derap pelaksanaan) tidak dilakukan atau didasarkan dengan menggunakan bukti-bukti peminjaman secara hukum (perjanjian/kontrak akad kredit dihadapan penegak hukum) tertulis, tetapi lebih dilakukan berdasar kepercayaan antara debitur dan kreditor dan dicatat diantara mereka tanpa prosedur atau proses hukum (normatif), sehingga cara-cara demikian memiliki kekuatan yang lemah sekali dalam proses pemecahan masalah apabila terjadi hal-hal yang menyimpang pada kesepakatan pihak debitur dan kreditur, bahkan hukum sulit untuk menyelesaikannya.

Bentuk - bentuk Perkreditan di Muncar

a. Perkreditan Jenis Pertama

- Setiap peminjaman (kredit) sejumlah Rp. 1 juta, maka ditarik potongan sebesar 1% dari hasil produksi kotor tangkapan setelah dipotong biaya retribusi pelelangan dan ongkos “manol” (kuli angkut).
- Pengambe' (kreditur), umumnya sebagai penjual dan ini seringkali mendapatkan komisi penjualan Rp. 100,- sampai dengan Rp. 500,-/kg ikan. Umumnya dijual kepada perusahaan-perusahaan pegolah (pengalengan dan penepungan ikan) yang mau dan mampu (*purchasing power*) membeli partai besar. Disamping itu kadang-kadang sering terjadi adanya manipulasi beratnya ikan yang lebih menyusut dari nilai yang sebenarnya dan menguntungkan pihak pengambe'. Disini *Bargaining position* nelayan pemilik lemah, dan sifatnya sangat tergantung kepada pengambe'.
- Pengambe' (kreditur) mendapatkan keuntungan menerima setiap harinya tanpa harus (tidak mau) menanggung resiko kerugian apapun bila terjadi berbagai kerusakan alat produksi, hanya terjadi tidak menerima persentase produksi apabila hasil produksi tidak ada sama sekali atau jumlahnya sedikit. Bila jumlah produksi sedikit maka terjadi apa yang dikenal dengan “bagi rusak”.

- Sistem pengembalian kredit harus dilakukan lunas (cara pengembalian lunas ini pada dasarnya adalah merupakan taktis pihak pengambe' untuk selalu enggan dilunasi, agar setiap pengikat pihak nelayan pemilik untuk tetap selalu tergantung). Di sisi lain nelayan pemilik merasa berhutang budi (nilai-norma sosial) pada pihak pengambe' yang telah ikut memberi andil (memberikan pinjaman) akan jalannya suatu usaha penangkapan. Disamping itu pembayaran lunas sekaligus juga dirasakan cukup berat bagi nelayan pemilik.

b. Perkreditan Jenis Kedua

Pada jenis kedua, perkreditan lebih didasarkan kepada peminjaman yang lebih lunak, yaitu berorientasi kepada jenis pengembalian besarnya uang makan nelayan. Oleh sebab itu didaerah Muncar dikenal dengan istilah membeli uang makan. Setiap pembelian uang makan besar kredit lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,-. Jenis perkreditan ini dicirikan sebagai berikut:

- Setiap peminjaman Rp. 1.500.000,-, memberikan imbalan hak pada pengambe'(kreditur) sebesar sejumlah uang makan yang diterima oleh pengambe'. Sedangkan besarnya uang makan adalah tergantung besar-kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan. Besar kecilnya uang makan adalah 0,5 % dari hasil tangkap setelah dipotong retribusi, kuli angkut dan pengambe' (bila ada). Setiap penerimaan Rp. 1.000.000,- maka uang makan adalah sebesar Rp. 5.000,-.
- Pihak pengambe' (kreditur), dipastikan selalu menerima hasil untuk setiap kali operasi, tanpa harus menanggung resiko apapun bila terjadi kerusakan alat-alat , sepanjang alat tangkap tersebut menghasilkan dan belum lunas peminjamannya (umumnya debitur enggan mengembalikan karena ikatan nilai dan norma kepada pengambe'). Sementara pembagian hasil khusus purse seine dilakukan ketika terang bulan purnama.
- Umumnya peminjaman kredit jenis ini, lebih ditujukan untuk mengantisipasi biaya-biaya operasional (pembelian bahan bakar dan lain-lain).

c. Perkreditan Jenis Ketiga

- Bentuk jenis perkreditan ini, lebih dikenal dengan sistem "Bapak angkat". Sistem bapak angkat adalah antara juragan darat (pemilik) dengan pihak pengusaha pengolah (pengalengan dan penepungan) sebagai bapak angkat nelayan. Sistem perkreditan ini lebih banyak bersifat membantu kedua belah pihak (saling menguntungkan). Masing-masing pihak memberikan kontribusi kemanfaatan melalui transaksi jual beli ikan. Pihak pengusaha mendapatkan secara kontinyu bahan baku untuk ikan olahan, pihak nelayan mendapatkan

pinjaman uang kontan dari pihak pengusaha dan sebagai imbalannya nelayan menjual ikan tangkapannya dengan harga pasar yang wajar. Jenis perkreditan ini dicirikan sebagai berikut:

- ❑ Pada jenis perkreditan ini, tidak terdapat bunga pinjaman, baik untuk kredit kecil maupun jumlah besar. Namun demikian bentuk ikatan kerjasama ini, bahwa pihak nelayan pemilik harus menjual hasil tangkapannya kepada pihak pengusaha, sedangkan pihak pengusaha akan membeli secara kontan hasil tangkapan tersebut sesuai harga pasar, yaitu harga umum yang terjadi pada tempat, waktu dan situasi tertentu.
- ❑ Pihak peminjam (debitur) nelayan pemilik dapat mengangsur pinjaman melalui hasil jual produksi yang besarnya tidak ditentukan, tergantung besar kecil harga jual. Umumnya nelayan juragan mengangsur lewat pemotongan ketika terjadi pembayaran. Waktu pengembalian tidak ditentukan selama periode tertentu.
- ❑ Apabila terjadi penyimpangan pada nelayan pemilik yang tidak menjual kepada pengusaha, maka sanksi berikutnya apabila terjadi peminjaman akan dipersulit bahkan tidak akan diberi lagi pinjaman ataupun kredit baru.
- ❑ Pengusaha dalam mengambil keuntungan dari pihak nelayan pemilik, sering dengan cara yang kurang baik yaitu sering kali memanipulasi menurunkan berat timbangannya (melalui petugasnya). Cara-cara ini sudah banyak diketahui dikalangan masyarakat nelayan, bahwa para pengusahapun melakukan kecurangan.

d. Perkreditan Jenis Keempat

Pada jenis perkreditan ini, umumnya pada perikanan alat tangkap payang gondrong (payang besar). Mengingat bahwa perikanan alat tangkap payang dengan jumlah nelayan yang sangat besar antara 13 sampai dengan 18 orang. Hal ini memerlukan suatu peluang usaha yang cukup besar risikonya. Resiko ini nampak terlihat dari segi faktor tenaga kerja. Pasar tenaga kerja alat tangkap payang yang sudah semakin langka, sehingga pasaran kerja relatif sangat mahal pengadaannya. Kiat untuk mendapatkan tenaga kerja, para nelayan pemilik perikanan tangkap dalam proses rekrutmen yaitu dengan cara mengikat tenaga kerja (nelayan buruh) dengan cara menghutangi mereka.

Cara ini cukup relatif, nampak bahwa tenaga kerja sulit untuk pindah ke lain jenis alat tangkap yang lebih produktif (purse seine sebagai pesaing utama). Permodalan untuk mengikat ini, memberikan konsekuensi cukup besar bagi para nelayan pemilik. Umumnya pemilik mencari pinjaman kredit dari para pengambe' yang besarnya bervariasi antara Rp. 1.500.000.-

hingga Rp. 3.000.000,-. Sedangkan besarnya pengikat tenaga kerja bervariasi antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 5.00.000,- per nelayan buruh yang lama ikut, besarnya hutang juga bertambah besar. Adanya kecenderungan pada masyarakat nelayan buruh tidak ada niat untuk mengembalikan hutang pengikat tersebut.

Disamping itu nelayan pemilik juga berkecenderungan tidak meminta uang tersebut dikembalikan, dimaksudkan agar nelayan buruh selalu dalam keadaan terikat terus (hal ini dimungkinkan sulitnya faktor tenaga kerja, utamanya pada usaha alat tangkap payang yang semakin langka). Bentuk kredit ini dicirikan sebagai berikut :

- ❑ Pemberi kredit (debitur) sebesar Rp. 150.000,- akan menerima hak sebesar 1 % dari hasil tangkapan, setelah dipotong retribusi pelelangan dan ongkos manol. Umumnya bervariasi kredit sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-
- ❑ Setiap kali pengembalian bentuk kredit, harus dilakukan secara total (sekaligus) didasarkan nilai dan norma yang ada, artinya tidak boleh diangsur.

Dari keempat bentuk jenis perkreditan non formal (pengambe'), maka jenis yang pertama adalah bentuk perkreditan yang tidak menguntungkan baik untuk nelayan pemilik atau nelayan buruhnya. Pada jenis bentuk ini telah semakin menyusut. Sedangkan bentuk yang mungkin saling menguntungkan adalah bentuk kedua, yang sekaligus menjadi suatu kelembagaan tersendiri yang dikenal dengan nama sistem bapak angkat. Pada bentuk perkreditan dengan sistem bapak angkat ini, makin lama semakin berkembang di Muncar. Namun demikian bentuk perkreditan ini hanya dijumpai pada perikanan alat tangkap purse seine. Dari hasil penelitian keragaman bentuk perkreditan ini, memberikan keragaman pola struktur perkreditan di masyarakat nelayan Muncar

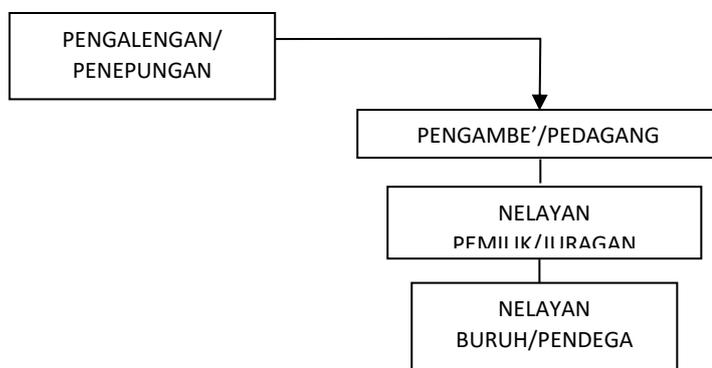
Struktur Perkreditan Pengambe' di Muncar

a. Struktur Perkreditan Pengambe' Pola Pertama

Pada struktur perkreditan ini, nampak bahwa posisi Nelayan pemilik (juragan darat) sangat lemah (ketergantungan). Hal ini dimungkinkan akibat dalam transaksi (normatif), bahwa pihak nelayan pemilik selalu terikat oleh adanya pemberian intensif yang cukup memberatkan untuk setiap kali proses produksi.

Sedangkan untuk memutus ikatan ini tidaklah mudah terutama akibat norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Bagi Pihak nelayan bahwa pinjaman (perkreditan) lebih dirasakan sebagai bantuan (budi), maka bentuk pengambilan dirasakan sebagai tidak dapat membalas

budi. Hal ini dapat dilihat pada struktur perkreditan pertama ditunjukkan seperti pada Gambar 2.



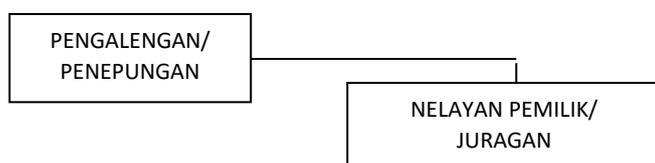
Gambar 1. Struktur Perkreditan Pola Pengamba' Pada Jenis Pertama

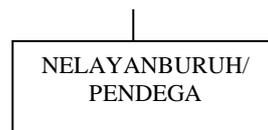
Disamping itu faktor-faktor yang diduga kuat sulitnya pengembalian perkreditan pola pengambe' ini karena nilai uang pinjaman (kredit) terlalu besar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- yang bentuk pengembaliannya tidak dapat diangsur. Faktor kedua adalah usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang ekstraktif (*hunting*) dan penuh resiko, sehingga hasil yang didapat tidak menentu pula. Hanya sebagian kecil nelayan yang dapat melepaskan diri dari sistem pengambe' pola pertama ini.

Pada kasus penelitian dijumpai seorang informan (nelayan pemilik) yang berakhir pada konflik, yaitu disitanya unit alat tangkap dan rumah dan beserta isinya dengan tidak syah (secara hukum formal). Penyelesaian masalah hukum sulit diatasi sebagai akibat perjanjian yang dilakukan hanya didasarkan pada kepercayaan saja. Konflik semacam ini memberikan dampak buruk bagi para nelayan buruh/pendega yang terkena sehingga kesulitan untuk mata pencahariannya.

Secara ekonomi pihak pengambe' selalu diuntungkan dengan adanya transaksi ini, karena tidak mau menanggung resiko apapun. Nelayan pemilik dan nelayan buruh/pendega akan menanggung biaya operasi penangkapan (sekalipun terjadi kegagalan), atau menanggung terjadinya kerusakan pada alat-alat produksi melalui pemotongan lewat bagi tengah. Sedangkan para pengambe' telah menerima hasil terlebih dahulu setelah dipotong biaya retribusi dan ongkos manol.

b. Struktur Perkreditan Pengambe' Pola Kedua





Gambar 2. Struktur Perkreditan Pola Pengambe' Jenis Kedua

Pada struktur perkreditan ini (gambar 3), nampak bahwa posisi nelayan pemilik /juragan darat jauh lebih baik dibanding dengan pola pertama. Hal ini dimungkinkan adanya situasi saling ketergantungan antara pihak nelayan pemilik dengan pihak pengusaha. Satu pihak (pengusaha pabrik pengalengan atau penepungan) tergantung akan kontinuitas bahan baku yang cukup besar (partai besar) sebagai suplai kelangsungan industri pengalengan atau penepungan.

Dipihak lain (nelayan pemilik) dengan sistem permodalan yang lemah terbantu oleh kredit investasi dari pihak pengusaha, sehingga dapat menopang laju usahanya. Namun demikian diduga kuat bahwa keberadaan pabrik (pengalengan/penepungan) sudah terikat dalam suatu asosiasi perusahaan sejenis, sehingga ini memungkinkan adanya pasar monopsoni yang lebih menguntungkan pihak pengusaha (sekalipun harga yang terjadi adalah “harga umum/pasar” namun dapat diduga kuat bahwa harga tersebut adalah hasil dari “rekayasa” asosiasi pabrik tersebut).

Disamping itu adanya sifat karakteristik ikan yang mempunyai daya tahan yang pendek (mudah busuk) dan keadaan musim ikan yang berfluktuasi menyebabkan *Bargaining* posisi pihak nelayan pemilik menjadi semakin lemah. Berbagai keuntungan nelayan pemilik adanya keberadaan industri pengalengan dan penepungan yang berskala besar memungkinkan produk hasil sebesar apapun tertampung oleh pihak pabrik.

Keuntungan kedua bahwa pabrik selalu membayar dengan uang kontan, keuntungan ketiga bahwa kredit yang diberikan oleh pihak pabrik tidak memberi bunga dan dengan mudah tanpa prosedural yang berbelit-belit yang didasarkan atas kepercayaan saja (*bonafide* moral) dengan kemudahan mengangsur sesuai dengan kemampuan produksi yang dihasilkan tanpa memberatkan pihak nelayan pemilik. Keuntungan yang lain peminjaman kredit bila telah dipercaya dapat dilakukan setiap saat. Dari kenyataan ini maka sekalipun kerjasama sistem bapak angkat ini saling menguntungkan tetapi sifat ketergantungan nelayan lebih besar dibanding para pengusaha (yang bermodalan besar sekali), sehingga posisinya tetap masih dibawah dari para pengusaha pengalengan atau penepungan.

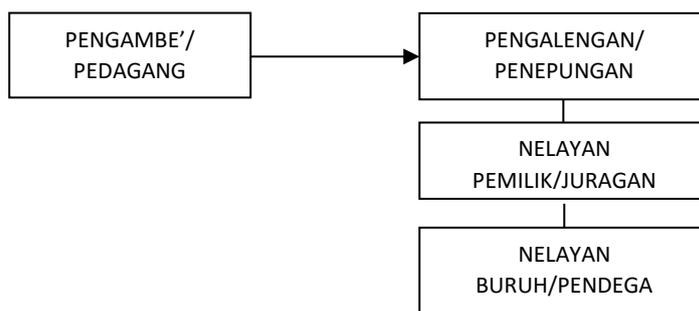
Pada umumnya untuk mengontrol (pengawasan) terhadap kejujuran nelayan pemilik dilapangan pihak pengusaha menegaskan agen-agensya dilapangan. Dan apabila ada kliennya yang menyimpang dari perjanjian (tidak memasukkan ikan ke pabrik maka untuk selanjutnya untuk peminjaman selanjutnya tidak diberikan lagi).

Hal-hal ini dimungkinkan khususnya ada sebagian besar pengusaha (*home industry*) penepungan skala kecil mau membeli ikan (rusak) dengan harga yang lebih dari harga pasaran. Apabila nelayan pemilik berhubungan dengan pihak pengusaha (pabrik) khususnya penepungan, maka bila nelayan mendapatkan ikan segar dalam keadaan baik dapat dijual diluar pabrik setelah dikontrol oleh pihak agen-agen pengusaha.

c. Struktur Perkreditan Pengambe' Pola Ketiga

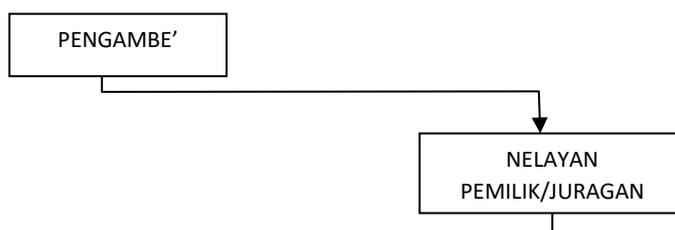
Pada struktur perkreditan ini, nampak bahwa posisi nelayan pemilik/ juragan memiliki dua variasi hubungan yaitu dengan pihak pengalengan atau penepungan dan yang kedua dengan pihak pengambe' (yaitu menaruh sejumlah uang, sebagai kompensasinya, pengambe'/kreditur mendapatkan sebesar satu bagian uang makan nelayan buruh/pendega, oleh sebab itu dikenal dengan membeli uang makan. Struktur ini terjadi sebagai akibat sistem hubungan sosial yang komunal (lebih diwarnai oleh solidaritas diantara nelayan pemilik/juragan).

Pada dasarnya ikatan pengambe' ini adalah alat sarana membantu hubungan bagi nelayan pemilik uang (pengambe' atau kreditur) yang merasa tidak dapat memutar uangnya. Dengan cara demikian mereka nelayan pemilik (juragan darat dan laut) dapat membantu teman-temannya diantara nelayan yang ikut berbagi rezeki.



Gambar 3. Struktur Perkreditan Pola Pengambe' Jenis Ketiga

d. Struktur Perkreditan Pengambe' Pola Keempat



NELAYAN BURUH/PENDEGA

Gambar 4. Struktur Perkreditan Pengambe' Pola Keempat

Pada struktur perkreditan ini, nampak bahwa posisi nelayan pemilik/juragan darat lemah (tergantung) karena selalu memberikan intensif atau potongan persentase hasil produksinya kepada pengambe'. Namun demikian pihak pengambe' tidak ikut menentukan penjualan, sehingga pihak nelayan pemilik masih memiliki kekuasaan dalam memutuskan harga yang terjadi.

Pada pola ini fungsi peminjaman utamanya adalah digunakan sebagai alat untuk pengikat antara pihak nelayan pemilik atau juragan darat dengan para nelayan buruh/pendega. Pola ini dijumpai pada perikanan tangkap payang di Muncar. Pemotongan persentase hasil produksi oleh pengambe', oleh sebagian besar nelayan dirasakan tidak begitu memberatkan dan cukup memadai.

Analisis Ekonomi Perkreditan Pola Pengambe'

Adapun di wilayah perairan Muncar tersedia potensi yang sangat besar ikan-ikan pelagis seperti lemuru, layang dan ikan tongkol. Sedangkan untuk ikan tuna dan cucut, juga masih dimanfaatkan tetapi rendah. Menurut perkiraan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur pemanfaatan potensi perikanan (tuna dan cucut) di wilayah perairan Muncar dibawah 10% dari potensi lestari.

Adopsi besar-besaran tentang perikanan tangkap purse seine. Penerapan teknologi maju ini menuntut konsekuensi modal investasi dan operasional yang cukup besar.

Namun demikian hampir rata-rata dikatakan bahwa masyarakat nelayan, melihat unsur kemajuan teknologi perikanan tangkap ini sebagai peluang bukan unsur resiko. Disisi lain berbagai kelemahan dan ancaman untuk mendorong dan meningkatkan penerapan teknologi maju selanjutnya antara lain adalah :

1. Secara umum tingkat pendidikan dengan rata-rata berpendidikan sekolah dasar.
2. Keterampilan dalam pengusaha alat tangkap relatif rendah, khususnya untuk mendeteksi populasi ikan setiap lokasi (fishing ground), dan
3. Umumnya rata-rata permodalan pengusaha pada perikanan tangkap ini masih relatif rendah.

Dari uraian sebelumnya, bahwa terdapat empat pola bentuk perkreditan pada masyarakat nelayan di Muncar. Terdapatnya pola perkreditan demikian memberikan pula hasil analisis

ekonomi yang beragam pula sesuai pola yang ada. Secara terinci jumlah modal yang dipinjamkan dan persentase imbalan yang diterima pengambe' dalam satu tahun disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah nelayan buruh/ pendega dan nilai investasi unit usaha purse seine dan payang besar di Muncar

Unit Usaha			
No.	Penangkapan	Jumlah nelayan buruh/Pendega	Investasi (Rp. Juta)
Purse			
1	Seine	35-40	84,31
Payang			
2	Besar	15-18	18,91

Tabel 2. Jumlah Modal Dan Persentase Imbalan Yang Diterima Oleh Pengambe' Dalam 1 Tahun Untuk Masing-Masing Pola Pinjaman Di Muncar

Pola	Unit Usaha Penangkapan	Modal (Juta)	Imbalan/Bunga*)	Kelipatan Bunga Bank
I	Purse Seine	10,0	191,8	8 Kali
II	Purse Seine	10,0	Tanpa Imbalan/Bunga	-
III	Purse Seine	3,0	57,5	2-3 Kali
IV	Payang Besar	1,5	Tidak Cukup Data Untuk Dianalisis	-

Dari tabel tersebut, pada pola I dan III nampak hasil analisis (penemuan) ekonomi, menunjukkan adanya suatu ketidakwajaran dengan tingkat bunga yang tinggi yaitu sekitar 2 sampai 8 kali tingkat bunga Bank atau lembaga perkreditan formal lainnya. Suatu kecenderungan tingkat bunga yang demikian sudah dapat dikatakan pengeksploitasian antara kaum pengambe' terhadap pihak nelayan pemilik sebagai pihak yang selalu dirugikan.

Struktur sosial ekonomi yang tidak wajar ini, umumnya oleh pihak nelayan pemilik sulit dipecahkan, karena salah satunya faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat di Muncar yang masih lemah. Hal ini terutama pada struktur permodalan yang lemah, tidak menentunya hasil tangkapan, dan struktur pasar (oligopsoni). Pada pola IV, sekalipun tidak didapatkan data yang kongkrit, tetapi dari data kualitatif kondisi inipun, juga sangat memberatkan (merugikan secara ekonomi) pihak nelayan pemilik.

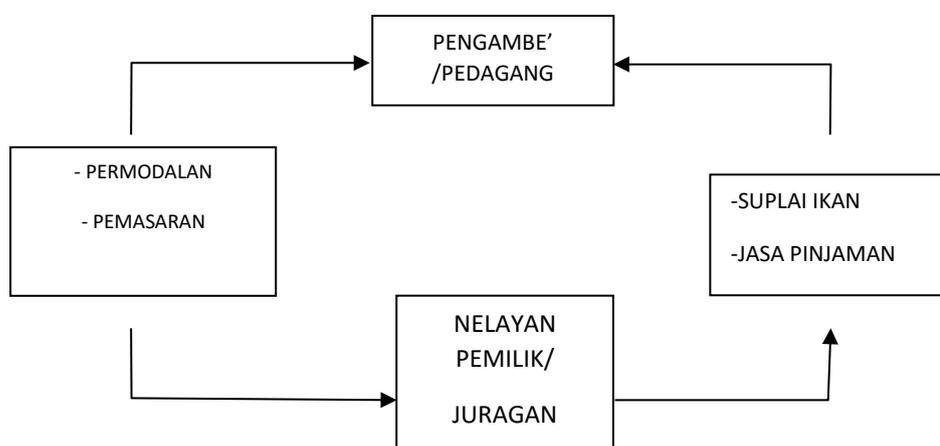
Pada pola II, menunjukkan bahwa hubungan sosial ekonomi antara pihak pengambe' dengan pihak nelayan pemilik adanya keserasian, yaitu saling menguntungkan pada kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Nampaknya pada pola ke II (sistem bapak angkat) merupakan alternatif terbaik untuk dapat dikembangkan lebih baik. Pola pembinaan sangat diperlukan terutama berkenaan tentang pendidikan (sosialisasi) dan kesadaran masyarakat nelayan untuk selalu patuh dan taat pada hal-hal kesepakatan atau perjanjian (kontrak) yang mereka buat, karena salah satu kunci utama hubungan adalah unsur "kepercayaan". Penyimpangan perjanjian akan membuat rusak hubungan diantara keduanya, yang pada akhirnya pihak nelayanlah yang sangat merugi.

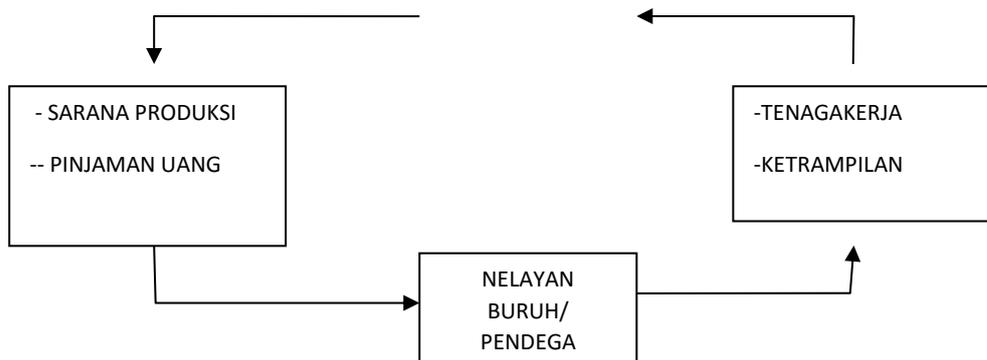
Struktur Ketergantungan Antara Pengambe', Nelayan Pemilik/Juragan dan Nelayan Buruh/ Pendega

Antara pengambe' atau pedagang, Nelayan Pemilik/ juragan dan Nelayan buruh /pendega terdapat hubungan ekonomi, dimana diantara satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Keberadaan pengambe' bermula dari keberadaan nelayan sebagai produsen ikan.

Oleh karena itu pengambe' atau pedagang dalam melakukan aktivitasnya sangat tergantung kepada aktivitas nelayan pemilik/juragan sebagai pensuplai ikan hasil tangkapan, sebaliknya nelayan pemilik/juragan tergantung kepada pengambe' atau pedagang dalam hal penyediaan modal dan jaminan pemasaran.

Sedangkan nelayan buruh/pendega sebagai penyedia tenaga kerja tergantung kepada nelayan pemilik/juragan sebagian penyedia sarana produksi dan tempat untuk meminjam, sebaliknya nelayan pemilik/juragan tergantung kepada nelayan buruh/pendega sebagai tenaga kerja dalam mengoperasikan alat-alat produksinya. Struktur ketergantungan antara pengambe', nelayan pemilik/ juragan dan nelayan buruh/pendega diperlihatkan seperti pada Gambar 6.





Gambar 5. Struktur Ketergantungan Antara Pengambe'/ Pedagang, Nelayan pemilik Juragan dan nelayan buruh/Pendega

Kelangsungan Sistem Perkreditan Pola Pengambe'

Sistem perkreditan pola pengambe' berlangsung dalam sistem kelembagaan pedesaan pantai dan sudah berlangsung cukup lama. Sejak kapan hubungan itu terjadi tidak dapat diketahui dengan pasti. Susilowati (1983) menyatakan,

bahwa pola hubungan ketergantungan nelayan kepada pengambe'/pedagang dimulai dari hubungan jual-beli ikan yang berlanjut kepada hubungan pinjam-meminjam. Pada awalnya pengambe'/pedagang belum dapat secara tegas menentukan harga jual.

Analisa teoritik yang ditulis oleh Susilo (1986) yang mendasar pada analisis Scott (1985) menyebutkan bahwa hubungan antara nelayan dan pedagang merupakan hubungan ketergantungan. Terdapat empat fase hubungan ketergantungan dari hubungan mutualistik (resiplokal) ke arah hubungan yang bersifat eksploitatif. Bukti empirik di lapangan dalam kaitan dengan analisis Susilo tersebut menunjukkan bahwa terdapat ikatan antara kedua belah pihak (Setiawan Qoid, A. Susilo, E Harahap N, 1993).

Keinginan untuk menjamin hubungan sosial yang langgeng ini pernah dikemukakan oleh Anderson et al. (1985), bahwa seseorang hidup lebih baik tergantung dalam suatu jaminan daripada hidup bebas dalam ketidakpastian jaminan. Hubungan sosial dalam perkreditan pengambe' ini selain dikehendaki dari pengambe', juga diminati oleh nelayan.

Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan nelayan dan pengambe' merupakan hubungan yang relatif fungsional, suatu hubungan yang mutualistik. Apabila pengambe' juga seorang pedagang, maka salah satu keuntungan dari pengambe' adalah suplai bahan baku bagi usaha perdagangannya atau pengolahannya. Suplai bahan baku tetap terjamin bagi pengambe', selama ikatan kepada nelayan tidak putus. Hubungan demikian ini merupakan hubungan ekonomi

diadik vertikal (Jonge, 1988) atau menurut Wolf (1985) merupakan hubungan diadik vertikal banyak benang.

Beberapa hal yang semakin menguatkan hubungan sosial tersebut antara lain :

- (1). masalah etnis dan agama, kesatuan etnis dan agama menyebabkan hubungan kepercayaan dapat dijalin dengan baik. Khususnya di Muncar menurut Emmerson (1982) pola hubungan tersebut tidak selalu dapat dilihat sebagai hubungan yang bersifat vertikal, tetapi merupakan hubungan yang horizontal; dan adanya konsepsi “orang dalam” bagi orang-orang yang pekerjaannya berkaitan dengan ikan dan “orang luar” bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak berkaitan langsung dengan ikan, menunjukkan betapa kuatnya hubungan tersebut terjalin,
- (2). Lokasi dan struktur masyarakat, keadaan di Muncar sebagai wilayah yang telah berkembang maka hubungan antara dan nelayan menjadi persaingan antar pengambe’. Para pengambe’ saling berusaha untuk menguatkan hubungannya dengan nelayan agar usahanya tetap berjalan,
- (3). Faktor *Power* (kekuasaan) yang dimiliki oleh pengambe’ dan diakui oleh nelayan (Blau, 1987).

Kelangsungan Sistem Perkreditan Lembaga Formal/Perbankan

Adanya pendirian lembaga formal perkreditan seperti perbankan, ternyata belum juga mampu menarik perhatian para nelayan untuk mengajukan kredit usaha secara resmi, yang tentunya memiliki sistem lebih baik dibanding sistem kredit Pengambe’. Meskipun pemerintah telah berupaya membuat kebijakan seperti : (i) kebijakan memberikan sebahagian laba (keuntungan) BUMN (1-5 %), dan (ii) kebijakan alokasi subsidi non BBM, bahkan telah pula diupayakan pengembangan lembaga keuangan mikro dengan menerapkan sistem kredit komersial pada tingkat bunga yang serendah mungkin, dimana pemerintah dapat berperan sebagai penjamin dan pembina teknis, sementara pihak perbankan berperan dalam penyediaan modal dan pembinaan manajemen keuangan dan organisasi.

Namun upaya inipun tampaknya tidak “favorit” didalam masyarakat nelayan tradisional. Sebagian besar masyarakat nelayan tradisional menganggap sistem tersebut sangat “kaku”, terfokus hanya pada masalah “uang” semata. Sementara di sisi lain, kondisi sosial keseharian masyarakat nelayan tradisional inipun perlu mereka hadapi dengan nyata. Kondisi ini terasa sekali ketika masyarakat nelayan memasuki musim paceklik. Pada musim paceklik dimana nelayan tradisional sama sekali tidak memperoleh pendapatan, kelangsungan realisasi

model-model pendanaan pemerintah tersebut ternyata menghadapi banyak kendala. Berikut tabel yang menjelaskan perbedaan sistem perkreditan pengambe' dengan lembaga keuangan formal/perbankan

Berdasar tabel 5 serta uraian diatas terdapat hal menarik yang perlu dikemukakan disini yakni mengapa nelayan tidak mau memanfaatkan lembaga keuangan formal (bank) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi justru mengikatkan diri pada sistem yang dilakukan oleh pengambe'?. Seolah-olah telah terjadi adanya ikatan lahiriah dan batiniah diantara kedua belah pihak.

Apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka peran yang dimainkan oleh lembaga keuangan formal (bank) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti telah disebutkan di atas hanyalah terbatas pada peran finansialnya saja ; itupun menurut nelayan tradisional memerlukan persyaratan yang memberatkan mereka. Di sisi lain, peran yang dimainkan oleh para pengambe' adalah meliputi keseluruhan peran (produksi, pemasaran, finansial dan sosial) yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat nelayan tradisional yang membuat mereka "rela" mengikatkan diri pada ikatan yang menimbulkan adanya kebergantungan. Oleh karena itu upaya untuk melepaskan ikatan antara nelayan dengan pengambe' lebih sering mengalami kegagalan daripada keberhasilan.

Tabel 3. Perbedaan Sistem Perkreditan Pengambe' dan Lembaga Keuangan Formal/Perbankan

Pengambe'	Lembaga keuangan Formal/perbankan
- tidak adanya jaminan/agunan	- adanya sistem agunan
- suku bunga tinggi ($\pm 10\%$)	- suku bunga rendah
- tidak ada batas tempo pengembalian,	- ada batas tempo pengembalian kredit
- berperan pada segi produksi, pemasaran, finansial dan sosial	- berperan hanya di segi finansial
- mengikat secara adat dan moral	- mengikat secara hukum
	- sistem birokrasi berbelit

Adanya asumsi bahwa para pengambe' merugikan nelayan ternyata tidak dapat menghilangkan hubungan yang telah berakar tersebut. Hubungan yang bersifat "*patron-client*" ini merupakan struktur dasar yang kuat dan tidak mudah untuk digantikan oleh struktur yang baru. Apakah fenomena ini merupakan ciri dari terbentuknya kemiskinan struktural di pedesaan

pantai? (FDC Sudjatmiko, 1985), masih memerlukan pengkajian lebih mendalam. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan struktural yang selalu diderita nelayan.

- **Pertama**, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan. Dalam sistem ini ditetapkan pendapatan bersih dari hasil penangkapan ikan pada setiap perahu dibagi dua. Sebanyak 50 persen menjadi milik majikan dan 50 persen lain dibagi merata kepada semua buruh nelayan dari perahu itu.
- **Kedua**, kesulitan nelayan mendapatkan modal usaha karena ketiadaan barang yang dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini dimaklumi sebab nelayan tradisional umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga bank tak rela mengucurkan kredit. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sikap bank mungkin saja benar. Maklum, dalam dunia perbankan, agunan (*collateral*) adalah wajib hukumnya dalam urusan perkreditan. Kondisi tersebut memang beralasan (bila ditinjau dari sisi ekonomi) karena kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini diperparah oleh ketidakpastian dalam memperoleh hasil tangkapannya. Sangat wajar apabila lembaga keuangan menghindari rasa ketakutan yang besar terhadap resiko kredit macet. Ini sangat berbeda dengan kaum tengkulak/pengambe' yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan, sekalipun suku bunga kredit yang diberlakukan sebesar 10% per hari, tetap saja dikejar rakyat kecil, seperti nelayan tradisional. Persyaratan kredit modal usaha yang begitu ketat dari perbankan membuat kehidupan sebagian besar nelayan tradisional jalan di tempat. Bagi mereka, untuk bisa memiliki perahu sendiri, walaupun hanya dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 7,5 juta per unit, merupakan mimpi panjang yang tak berujung.
- **Ketiga**, ketidakseriusan pemerintah untuk memberdayakan sektor kelautan. Contoh sektor pertanian. Pada 30-an tahun lalu, sektor ini nyaris tak diberi perhatian serius. Ketika dicanangkan pembangunan berbasis pertanian, semua instansi terkait juga diwajibkan mengonsentrasikan program guna mewujudkan program itu. Perbankan, misalnya, langsung mengucurkan berbagai jenis kredit. Selain itu, diterjunkan tenaga penyuluh yang setiap saat mendampingi petani dalam proses produksi pertanian.

Sementara itu, kelautan dan perikanan yang memiliki potensi yang begitu besar dan didengungkan sebagai lokomotif ekonomi di masa depan ternyata belum mendapat perhatian serius. Belum ada perbankan atau lembaga keuangan yang memberi perhatian penuh pada

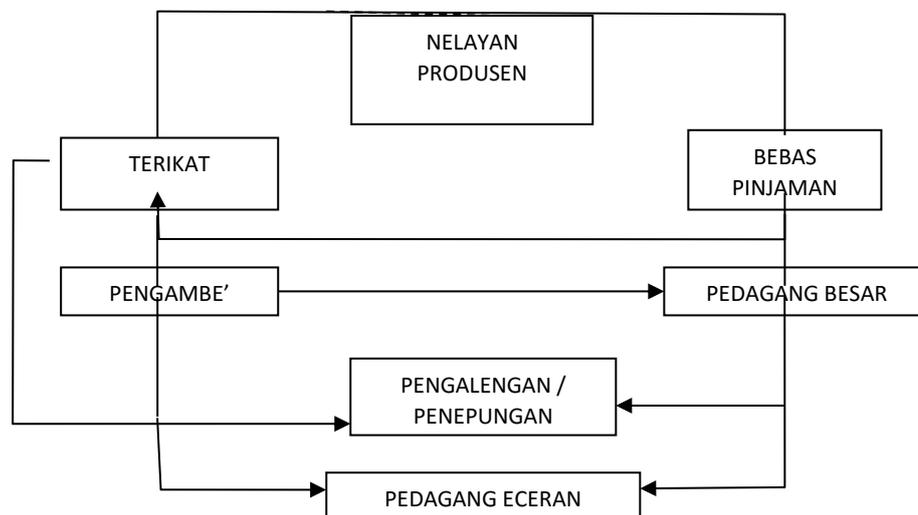
usaha sektor kelautan. Kalaupun ada, fasilitas kredit itu umumnya dinikmati pelaku usaha kelas menengah ke atas, sedangkan nelayan tradisional sulit mendapatkan modal usaha.

Saluran Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan

Pemasaran merupakan suatu proses pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan yang tertuju untuk memindahkan barang atau jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi (produsen ke konsumen).

Proses pemasaran ikan di Muncar, diawali dari hasil tangkap yang diperoleh kemudian didaratkan di pelabuhan untuk selanjutnya dijual melalui sistem pelelangan ikan di bongkar dari kapal kemudian diangkut ke tempat pelelangan ikan dengan menggunakan jaring bambu (70 kg/keranjang). Selanjutnya diangkut oleh manol (kuli) ke pelabuhan untuk dilakukan penjualan lewat tempat pelelangan ikan (TPI). Umumnya proses pelelangan tidak dilakukan secara murni. Berdasarkan peraturan no. 10 1988 dalam pelaksanaan pelelangan dibebani retribusi 5% yaitu 2,5% ditarik dari penjual (nelayan) dan 2,5% dari pembeli.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat berbagai keragaman pada struktur pemasaran ikan (segar). Struktur pemasaran ini, ditinjau dari pelaku-pelaku ekonomi didasarkan atas kekuasaan (penentu harga atau bargaining power). Ada 3 variasi struktur pemasaran. Perbedaan variasi struktur pemasaran lebih ditentukan oleh beberapa hal antara lain : (a) jenis ikan, (b) mutu ikan, (d) ikatan perjanjian jual beli (ambe'an).



Gambar 6. Saluran pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di daerah Muncar

SIMPULAN

Di daerah Muncar, terdapat 4 pola hubungan antara pengambe' (kreditur) dan pihak nelayan. Kecenderungan nelayan untuk melakukan peminjaman kepada pengambe' disebabkan beberapa faktor antara lain: keterbatasan permodalan yang dimiliki nelayan, kemudahan dalam cara atau prosedur peminjaman dari pengambe' / pedagang yang setiap saat bersedia melayani nelayan yang membutuhkan pinjaman, serta adanya jaminan bagi nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya. Kurangnya minat nelayan untuk memanfaatkan lembaga keuangan formal (bank) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya dan justru mengikatkan diri pada sistem yang dilakukan oleh pengambe', dikarenakan lembaga formal tersebut hanya berperan secara finansial saja dan prosedur peminjamannya cukup memberatkan. Berbeda dengan pengambe' yang sistem peminjamannya hampir meliputi keseluruhan peran (produksi, pemasaran, finansial dan sosial) yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat nelayan tradisional yang membuat mereka "rela" mengikatkan diri pada ikatan yang menimbulkan adanya kebergantungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, R. C., Hiebert, E. H., Scott, J. a, Wilkinson, I. A. G., Becker, W. C., & Becker, W. C. (1985). *Becoming a nation of readers: The report of the Commission on Reading. Education and Treatment of Children*, 155.
- Anggito, A, & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Blau, P. L. (1987). *Social Exchange : The Power in Social of life*. John Wiley and son, Inc.
- Eklesia, M. I., & Riyadi, S. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Modal Bank, dan Suku Bunga Dasar Kredit terhadap Penyaluran Kredit. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(2). <https://doi.org/10.32502/jimn.v10i2.2985>
- Emmerson, D. K. (1982). Orders of Meaning: Understanding Political Change in a Fishing Community in Indonesia. In *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*.
- Erniati, E., Syahrial, S., Imanullah, I., Erlangga, E., 'Akla, C. M. N., Shobara, W., Nasuha, J., Ritonga, G. H., Daulay, A. M., Romansah, H., Amni, I., & Berutu, T. L. (2022). Rumput Laut yang Tumbuh Alami di Pantai Barat Pulau Simeulue, Aceh Indonesia: Faktor Lingkungan dan Variasi Geografik. *Jurnal Kelautan Tropis*, 25(1). <https://doi.org/10.14710/jkt.v25i1.12645>
- FDC Sudjatmiko. (1985). *Pokok Pokok Pelayaran Niaga*.

- Febriansyah, E., Melda Yunita, & Hardiansyah. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN KREDIT KUR TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN UMKM PADA BANK BRI SYARIAH KOTA BENGKULU. *JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI*, 2(1).
- Iraa, P. (2020). Perancangan Pusat Wisata Edukasi Biota Laut di Rokan Hilir dengan Pendekatan Arsitektur Biomimetik. *ALUR: Jurnal Arsitektur*, 3(2). <https://doi.org/10.54367/alur.v3i2.811>
- Mubiroh, S., & Ruscitasari, Z. (2020). Implementasi SAK EMKM dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Kredit UMKM. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.15265>
- Muhartono, R., & Nurlaili, N. (2019). HUTANG SEBAGAI PENGIKAT HUBUNGAN NELAYAN DAN ‘PENGAMBE’ DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2). <https://doi.org/10.15578/jsekp.v13i2.6869>
- Nasir, M. A. (2020). *Imunitas UMKM Di Tengah Pandemi*. Universitas Jember.
- Rantauni, D. A., & Sukmawati, E. (2022). Correlation of Knowledge and Compliance of Implementing 5m Health Protocols in the Post-Covid-19 Pandemic Period. In *Science Midwifery* (Vol. 10, Issue 4). Online. www.midwifery.iocspublisher.orgjournalhomepage:www.midwifery.iocspublisher.org
- Rasbin. (2020). RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK MENDORONG Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021. *Info Singkat*, XII(23).
- Sari, E. K. (2020). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Jaminan Kredit, Dan Jangka Waktu Pengembalian Terhadap Permintaan Kur Bank Bni Magelang. *UMMagelang Conference Series*.
- Setiawan Qoid, A. Susilo, E Harahap N, R. H. (1993). Peranan KUD/TPI dan pedagang ikan terhadap usaha penangkapan ikan (Studi kasus dengan pendekatan ‘Ketergantungan dan inovasi’) di Pacitan, Jawa timur. *Fakultas Perikanan Brawijaya. Malang*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Penerbit

Alfabeta.

Sukamto. (2017a). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *Mailia: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).

Sukamto. (2017b). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.

Sukamto. (2017c). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *Mailia: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).

Susilo, A. (1986). *Studi tentang warna pada poster luar Solo berseri sponsor gudang garam surya di kota madya Surakarta*. Yogyakarta: FSRD ISI Yk.

Susilowati. (1983). *Manajemen Konstruksi (Buku)*.